MACAM-MACAM LEMBAGA PERWAKILAN

ROBBY NEL ANDRES

Email: robbynelandres81682@gmail.com

No BP: 2010003600255

UNIVERSITAS EKA SAKTI

A. PENDAHULUAN

Lembaga-lembaga Negara merupakan pembagian tugas tugas kepada pemerintah yang berkuasa, dimana yang memrintah tidak hanya satu dua orang tetapi terdiri dari beberapa lembaga, organisasi dan sebagainya. Materi ini membahas tentang pembagian kekuasaan mulai dari tingkat pusat, kota dan provinsi, kecamatan dan desa. Pada pemerintahan pusat terbagi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang memiliki tugas yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan setelah adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pasca-Orde Baru. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Pada lembaga legislatif terdiri dari tiga lembaga yaitu MPR, DPR dan DPD, yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Eksekutif mempunyai tugas utama yaitu menjalankan undang-undang. Sedangkan yudikatif memiliki tiga lembaga yaitu MA, MK dan KY. MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat.

Pada hukum tata negara terdapat kaidah-kaidah yang mendelegasi kekuasaan dari pembuat UUD pada pembuat UU, dari organ yang tertinggi kepada organ yang lebih rendah untuk

membuat aturan-aturan yang berlaku. Jadi, pendelegasi yang termasuk dalam hukum tata negara ini adalah tingkat tertinggi. Lembaga-lembaga ini dibuat untuk memberikan tugas dan wewenang dan untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Pembatasan ini untuk mempermudah dan lebih memfokuskan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab pada tugas yang sudah ditetapkan. Setiap lembaga wajib melakukan tugas yang mereka terima dan melaporkan hasil kerjanya serta adanya pertanggung jawaban kepada tingkat pusat atau ke yang lebih tinggi. Apabila suatu lembaga tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka diberikan sanksi sampai diberhentikan.

B. PEMBAHASAN

A. Lembaga-Lembaga Negara Dalam Susunan Pemerintahan Pusat

1. Lembaga Legislatif

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legislatif) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (unicameral) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bicameral). Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Seiring dengan tuntutan reformasi keberadaan MPR dalam system ketatanegaraan Indonesia banyak melahirkan perdebatan. Satu pihak menghendaki MPR dihilangkan karena fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah cukup dilakukan oleh DPR, sementara di pihak lain tetap menghendaki MPR tidak dibubarkan. Dari ketiga lembaga legislatif tersebut posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia. Menurut Asshiddiqie, keberadaan MPR terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam arti

jika kedudukannya sebagai suatu lembaga dihilangkan dapat dinilai menghilangkan satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita yang justru dianggap perlu dilestarikan. Salah satu keberatan pihak yang mempertahankan keberadaan MPR ini berargumentasi bahwa, jika MPR ditiadakan atau hanya sekadar dianggap nama dari parlemen dua kamar (bicameral), maka sila ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan’ menjadi berubah. Prinsip permusyawaratan tercermin dalam kelembagaan MPR, sedangkan prinsip perwakilan dianggap tercermin dalam kelembagaan DPR.¹ Jadi, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga lainnya. Tugas dari MPR yaitu mengubah dan menetapkan UUD 1945. MPR juga bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999, dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergerakan kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20). Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislatif nasional yang semula berada di tangan presiden, beralih ke tangan DPR. Rumusan pasal 20 (baru) berbunyi sebagai berikut:

1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan undang-undang itu mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang merupakan perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki 3 fungsi yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Membentuk undang-undang terlebih dahulu dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi perlemen diindonesia menjadi dua kamar yang diadopsi. Perbedaan DPD dan DPR terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah.

DPD adalah lembaga negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi:

1. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
2. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

2. Lembaga Eksekutif

Pemerintahan memiliki dua pengertian:

- a) pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintahan yang meliputi keseluruhan lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif dan yudikatif);
- b) pemerintahan dalam arti sempit yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja.

Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara, seperti raja, perdana menteri, atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam system presidensial seperti Indonesia, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam system parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Menurut perubahan ketiga UUD 1945 pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Adapun, sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Adapun wewenang, kewajiban dan hak presiden antara lain:

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4. Menetapkan peraturan pemerintah.
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
6. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.

7. Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Cabang kekuasaan Eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan Negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan Negara yaitu:

- a. Sistem pemerintahan presidential
- b. Sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet
- c. Sistem campuran

3. Lembaga Yudikatif

Sesuai dengan prinsip pemindahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri dari dua kamar, yakni DPR dan DPD, maka kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai dua pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 1945) telah membawa perubahan kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Menurut pasal 24A Ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Disamping itu, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden, serta mengajukan tiga orang sebagai hakim konstitusi pada

Mahkamah Konstitusi (Pasal 14 Ayat (1). Selain kekuasaan yang diatur oleh UUD 1945, dalam undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung ditentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk:

1. Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan dibawahnya.
2. Mengadakan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan di bawahnya.
4. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang republik Indonesia.
5. Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain.

b. Mahkamah Konstitusi

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 yang telah diamandemen juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam sturuktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C jo Pasal III aturan peralihan perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945 yang meliputi lima perkara pokok yaitu:

1. Menguji konstiusionalitas undang-undang.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.

4. Memutus perselisihan pemilu umum.
5. Memberika putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden.

B. Lembaga-Lembaga Negara dalam Susunan Pemerintahan Tingkat Kota dan Provinsi

1. Gubernur

Pada peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang guberbur sebagai wakil pemerintah pusat, pasal 1: “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembentukan oleh daerah kabupaten/kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.” Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gebernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas:

- a. Mengordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan didaerah kabupaten/kota.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tat ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota.

2. Bupati

Bupati atau kepala daerah memiliki tugas dan wewenang kepala daerah:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- d. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi yaitu dipegang oleh MPR. MPR memiliki berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. DPD mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, bidang legislative adalah DPR. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya yang membantunya. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas MA, MK dan KY

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di

Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia

Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights

In The Area Of Social Conflict, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference

(Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk

Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume

10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan

Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri,
Pengaruh

Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan
Komnas

Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi,
Jurnal Menara

Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, Pendidikan Kewarganegaraan, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-
Undang Dasar

1945, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020,
<http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk
Mencapai

Tujuan Negara Hukum, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai
Sebagai Bentuk

Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal
Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari
Yudistia,

Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk
Pelayanan

Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak, Volume 17, No Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba

Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, UIR Law Review,

Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia

Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, Protection Of Children's Rights Of The Islamic And

Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan

dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan

untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020